

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN – I



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Palangka Raya
Tahun 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I KINERJA	1
A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansial	1
BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	18
A. Kendala dan Permasalahan	18
B. Tindak Lanjut Penyelesaian.....	18
BAB III PENUTUP	20
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2022 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rancangan Strategis PD Tahun 2021- 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Hasil capaian kinerja sasaran secara umum ada peningkatan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan target pada triwulan I, yang terutama dalam rencana aksi pelaksanaan kinerja. Tingkat capaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh berorientasi pada capaian visi dan misi. Capaian pada triwulan I merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja. Masih ada target yang belum tercapai dan akan ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhirnya melalui Laporan Kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja khususnya seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun - tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Palangka Raya, 31 Mei 2022

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006

BAB I KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan I tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 Triwulan I serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100,22%
	- Persentase ARG pada belanja langsung APBD	130,23%
2.	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	88,23%
3.	Meningkatkan pemenuhan Hak dan Perlindungan terhadap anak	
	- Indeks Perlindungan Anak (IPA)	100%
	- Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	183,43%
4.	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	100%
5.	Meningkatkan kualitas keluarga	
	- Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	89,58
	- Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	93,75
	- Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	105

6.	Meningkatnya akseptor KB	
-	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	87,36
-	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	42,70

7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB
	JUMLAH	93,375

Tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan I tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Target Capaian Triwulan I			Ket
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,90	81,90	82,08	100,22%	Bidang I
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	3,43	0,86	1,12	130,23%	Bidang I
2	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	85 %	85 %	75,00	88,23%	Bidang IV dan UPT-PPA
3	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,83	61,515	61,515	100%	Bidang III
		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	50	46	84,38	183,43%	Bidang III dan UPT-PPA
4	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	Kab/Kota	6 Kab/Kota	1	1	100%	Bidang II
5	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	60,32	60,32	54,01	89,53	Bidang V
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TF R per WUS usia 15-49 Tahun	2,10	2,10	2,24	93,75	Bidang V
		Angka Kelahiran	Age	21	21	20	105	Bidang

*Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah*

		remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	Specific Fertility Rate/AS FR 15-19					V
6	Meningkatnya akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	persen	73,23	73,23	63,98	87,36	Bidang V
		Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	persen	5,36	5,36	12,55	42,70	Bidang V
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	BB	BB	100 %	Sekretariat

Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana, dan Program/kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					14.829.029.000
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				14.346.269.700
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah				11.066.681.398
1.		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			230.237.850
	a.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	31.245.900
	b.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5 Dokumen	23.638.100
	c.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	26.208.500
	d.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	149.145.350

2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.305.000.635
	a.		Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN		7.233.500.635
	b.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	6.500.000
	c.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Bulan	65.000.000
3.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000
	a.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	10.000.000
4.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			49.642.000
	a.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	49.642.000
5.		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.057.924.351
	a.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	26.504.000
	b.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	40.000.000

	c.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	35.000.000
	d.		Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	39.250.000
	e.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	30.000.000
	f.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	784.960.351
	g.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	102.210.000
6.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			599.469.000
	a.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	12 Bulan	450.469.000
	b.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	149.000.000
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.724.567.562
	a.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5.000.000
	b.		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	533.545.162
	c.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.186.022.400

8.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			89.840.000
	b.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		50.000.000
	c.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		39.840.000
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.283.531.350
1.		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			188.500.000
	a		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	70.000.000
	b		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	70.000.000
	c		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	48.500.000
2.		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			1.058.031.350

*Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah*

	a		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	8 Dokumen	959.000.000
	b		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	8 Dokumen	99.031.350

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			37.000.000
a.			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	37.000.000
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				732.330.621
1.		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			382.277.000
a.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan	5 Dokumen	47.921.000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
b.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	334.356.000
2.		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			225.177.577
a.			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	134.657.577
b.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	90.520.000
3.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			124.876.044

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b.			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	99.876.044
a.			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
1.		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			74.398.750
a.			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	74.398.750
2.		Penyedia Layanan bagi keluarga Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			83.149.000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Provinsi		
a.			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		83.149.250
V.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				218.245.000
1.		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			218.245.000
a.			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	7 Dokumen	67.320.000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b.			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	7 Dokumen	150.925.000
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				360.341.370
1.		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			189.686.650
a.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	117.078.650
b.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	72.608.000
2.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			170.654.720
a.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	105.593.000
VII.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				527.592.211

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			75.450.000
2.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Provinsi			452.142.211
a			Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	100.902.000
b			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	1 Dokumen	351.240.211
VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				198.477.300
1.		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			198.477.300

a.			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	n	150.000.000
b.			Advokasi dan Sosialisasi GDPK	2 Dokumen	48.477.300
II	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				136.994.500
1.		Pengembangan Desain Program. Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			52.024.500
a.			Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen	52.024.500
b.			Pembinaan Promosi Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK dan Konseling Kesehatan Reproduksi	2 Dokumen	84.970.000

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Program	Kegiatan		Target	Anggaran
					(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				147. 287.500
1.		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			147. 287.500

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Beberapa kendala yang secara umum mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan I adalah :

- a. Perubahan fungsi untuk urusan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu adanya pelayanan diperlukan penyesuaian baik dari sisi perencanaan penganggaran hingga tahap pelaksanaan dan evaluasi dan regulasi sebagai pendukung.
- b. Kurangnya tenaga di Dinas P3APKB sehingga pencapaian program dan kegiatan kurang maksimal.
- c. Dengan berdirinya UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan anggaran, sarana, prasarana dan tenaga profesional sehingga Pelayanan dapat berjalan maksimal
- d. Perlunya Pemahaman aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana belum menyeluruh
- e. Belum maksimal pelaksanaan SOP yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas
- f. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- g. Kurangnya inovasi dalam penerapan, rencana kebijakan dan tindak lanjut kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- h. Belum optimalnya koordinasi internal Perangkat Daerah terkait pencapaian kinerja.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Beberapa tindak lanjut yang dapat diterapkan guna meminimalisir rendahnya capaian kinerja berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Dengan adanya UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai fungsi pelayanan maksimal kepada masyarakat korban kekerasan diperlukan dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia, Rumah Aman dan kegiatan-kegiatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Dalam menghadapi rasionalisasi anggaran upaya dalam mencapai target yang ada yaitu dengan menggunakan digital untuk koordinasi ke Pusat, Lintas Sektor dan Program dan Kabupaten/Kota, yang minim berusaha melaksanakan kegiatan secara elektronik baik virtual dan WA group untuk koordinasi dan evaluasi baik ke pusat dan Kabupaten/Kota.
- c. Perlu diimplementasikan target kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja secara

berjenjang dari eselon II sampai ditingkat eselon III dan IV

- d. Pergub 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat tugas pokok fungsi PD, dapat dijadikan acuan dalam menyusun SOP guna mendukung pelayanan.
- e. Dilakukan rewiuw terhadap kinerja masing-masing bidang pelayanan menyangkut capaian program (*outcome*), kegiatan (*output*) yang dituangkan kedalam satu bentuk dokumen
- f. Membuat rencana aksi yang merupakan penjabaran target-target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja ke dalam periode bulan/triwulan/semesteran dan monitoring pencapaiannya
- g. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi aparatur melalui diklat-diklat dan pelatihan teknis, memperbanyak koordinasi baik vertikal dan sektoral terkait bidang layanan.
- h. Perlu adanya inovasi dan strategi dalam pencapaian target indicator Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- i. Perlu diberikannya Reward kepada Pegawai dan Pejabat yang berhasil dalam pencapaian indikator dan yang berinovasi dalam peningkatan Pencapaian dan kemajuan Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah.
- j. Perlu adanya Panisemen kepada pegawai dan pejabat yang belum berhasil dalam pencapaian indikator Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappedalitbang dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, maupun Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I tahun 2022 ini menyajikan capaian hasil baik yang mencapai target maupun yang tidak mencapai target dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana secara Keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan dunia usaha dan inovasi.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah triwulan I tahun 2022 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah perlu upaya – upaya dalam pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Terkait beberapa kendala dan kekurangan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara selektif (hanya Program/Kegiatan terkait kinerja PD yang menjadi prioritas) sehingga tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target.
2. Perlunya Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinerja.
3. Perlunya Penambahan SDM untuk mengisi kekosongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah
4. Mengingat kurangnya data sektoral terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah baik data primer maupun data sekunder maka perlu dilakukan inventarisasi dan survei data terkait kinerja PD terutama dari program kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempermudah pengukuran hasil kinerja dan perencanaan kinerja kedepannya.
5. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.
6. Perlu memperkuat UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Propinsi Kalimantan Tengah, dalam sarana, prasarana dan tenaga yang berkompeten sehingga pelayanan yang dilaksanakan dapat maksimal. Perlu adanya Promosi dan informasi dalam menginformasikan telah adanya tempat Perlindungan perempuan dan anak di Propinsi Kalimantan Tengah, yang juga melakukan pelayanan via Hotline kepada Masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi keluarga berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator. Dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak (PHA) di semua Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat. Agar setiap Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan

evaluasinya, maka tugas awal yang paling mendasar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Dan dalam implementasinya diperlukan perubahan baik itu individu dan budaya lembaga dari yang belum memahami menjadi memahami, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli terhadap anak.

Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih dan tidak dapat diukur dalam jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Dengan adanya visi dan misinya, maka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan semua Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatannya.

Kendati proses pencapaian tujuan dan penetapan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bersifat kompleks, cenderung bernuansa kualitatif dan acap kali merupakan output dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan berarti kinerja PD ini tidak dapat diukur karena ada fungsi pelayanan yaitu pada Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 31 Mei 2022

KEPALA DINAS P3APKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006

DOKUMENTASI RAPAT TRIWULAN I

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Jalan M. H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

A. Target Realisasi Kinerja Tahunan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Waktu Pelaksanaan				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,90	81,90	81,90	81,90	81,90	Bidang I IDG = $\frac{(I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-dis}))}{3}$ Kontribusi Komponen Keterwakilan di parlemen, pengambil keputusan dan distribusi pendapatan
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	3,43%	0,86%	0,86%	0,86%	3,43%	Bidang I Rumus <u>Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD</u> = $\frac{\text{Anggaran Belanja Langsung (Operasi dan modal) APBD dalam GBS di bagi Anggaran Belanja Langsung (Operasi dan modal) APBD dikalikan 100}}{}$ = $\frac{35.196.877.863}{3.131.184.116.124} \times 100\%$ = 1,12 %
2	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	Bidang IV dan UPT-PPA (Semakin Besar Persentase Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Semakin Bagus) Sumber Data : Simfoni PPA Kementerian PPPA RI
3	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,83	61,51 5	61,62	61,72 5	61,83	Bidang III Pelayanan UPT Optimal

		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	50%	46%	48%	49%	50	Bidang III dan UPT-PPA
4	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	Kab/Kota	6 Kab/ Kota	1	1	2	6	Bidang II Target 6 kab/kota di Triwulan IV setelah Rakor Forum Data se Kalteng, direncanakan pada bulan Juni 2022
5	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32	Target Ibangga Th 2021 55,00 Capaian Ibangga Th 2021 54,01 Sumber Data PK 21 Perwakilan BKKBN Bidang V
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-49 Tahun	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	Target TFR Th 2021 2,24 Capaian TFR Th 2021 2,24 (semakin kecil semakin bagus) Sumber SDKI 2017 Bidang V
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19	21	21	21	21	21	Target ASFR Th 2021 24 Capaian ASFR Th 2021 20 (semakin kecil semakin bagus) Sumber SDKI 2017 Bidang V
6	Meningkatnya akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	persen	73,23	73,23	73,23	73,23	73,23	Target mCPR th 2021 62,16 persen Capaian mCPR th 2021 57,00 persen Data PK 21 Perwakilan BKKBN Kalteng Bidang V
		Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	persen	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	Target Unmeet need th 2021 8,30 persen Capaian th 2021 18 persen (semakin kecil semakin bagus) Data PK 21 Perwakilan BKKBN Kalteng Bidang V
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	BB	BB	BB	BB	Sekretariat

B. Target Realisasi Kinerja Triwulan I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Target Capaian Triwulan I			Ket
					Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,90	81,90	82,08	100,22%	Bidang I IDG = $\frac{(I \text{ (par)} + I \text{ (DM)} + I \text{ (inc-dis)})}{3}$ Kontribusi Komponen Keterwakilan di parlemen, pengambil keputusan dan distribusi pendapatan
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	3,43	0,86	1,12	130,23%	Bidang I Rumus Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD <u>=Anggaran Belanja Langsung (Operasi dan modal) APBD dalam GBS di bagi Anggaran Belanja Langsung (Operasi dan modal) APBD dikalikan 100 %</u> = 35.196.877.863 $\frac{3.131.184.116.124}{35.196.877.863} \times 100 \%$ = 1,12 %
2	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	85 %	85 %	75,00	88,23%	Bidang IV dan UPT-PPA (Semakin Besar Persentase Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Semakin Bagus) Sumber Data : Simfoni PPA Kementerian PPPA RI
3	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,83	61,515	61,515	100%	Bidang III

		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen	50	46	84,38	183,43%	Bidang III dan UPT-PPA Pelayanan UPT Optimal
4	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	Kab/Kota	6 Kab/Kota	1	1	100%	Bidang II Target 6 kab/kota di Triwulan IV setelah Rakor Forum Data se Kalteng, direncanakan pada bulan Juni 2022
5	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	60,32 (Indeks Pembangunan Keluarga)	60,32	54,01	89,53%	Target Ibangga Th 2021 55,00 Capaian Ibangga Th 2021 54,01 Sumber Data PK 21 Perwakilan BKKBN Bidang V
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-49 Tahun	2,10/Rata-rata anak per wanita	2,10	2,24	93,75%	Target TFR Th 2021 2,24 Capaian TFR Th 2021 2,24 (semakin kecil semakin bagus) Sumber SDKI 2017 Bidang V
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19	21/ kelahiran per 1000 wanita usia 15-29	21	20	105%	Target ASFR Th 2021 24 Capaian ASFR Th 2021 20 (semakin kecil semakin bagus) Sumber SDKI 2017 Bidang V
6	Meningkatnya akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	persen	73,23	73,23	63,98	87,36%	Target mCPR th 2021 62,16 persen Capaian mCPR th 2021 57,00 persen Data PK 21 Perwakilan BKKBN Kalteng Bidang V

		Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	persen	5,36	5,36	12,55	42,70%	Target Unmeet need th 2021 8,30 persen Capaian th 2021 18 persen (semakin kecil semakin bagus) Data PK 21 Perwakilan BKKBN Kalteng Bidang V
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	BB	BB	100 %	Sekretariat

C. Target Realisasi Keuangan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Triwulan I			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	14.829.029.000	1.507.824.099	10,17	1.785.062.349	12,04
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.829.029.000	1.507.824.099	10,17	1.785.062.349	12,04
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.066.681.398	1.324.613.399	11,97	1.324.613.399	11,97
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.237.850	16.639.100	7,23	16.639.100	7,23
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.245.900	4.094.000	13,10	4.094.000	13,10
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.638.100	4.236.000	17,92	4.236.000	17,92
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.208.500	5.145.500	19,63	5.145.500	19,63
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.145.350	3.163.600	2,12	3.163.600	2,12
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.305.000.635	895.470.778	12,26	895.470.778	12,26
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.233.500.635	878.984.378	12,15	878.984.378	12,15
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.500.000	100,00	6.500.000	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	65.000.000	9.986.400	15,36	9.986.400	15,36
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	-	0,00	-	0,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	-	0,00	-	0,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.642.000	-	0,00	-	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.642.000	-	0,00	-	0,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.057.924.351	83.208.500	7,87	83.208.500	7,87
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.504.000	4.400.000	16,60	4.400.000	16,60
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	4.998.500	12,50	4.998.500	12,50
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	8.730.000	24,94	8.730.000	24,94
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.250.000	195.000	0,50	195.000	0,50
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	7.000.000	23,33	7.000.000	23,33

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	784.960.351	57.885.000	7,37	57.885.000	7,37
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	102.210.000	-	0,00	-	0,00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	599.469.000	199.200.000	33,23	199.200.000	33,23
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	450.469.000	199.200.000	44,22	199.200.000	44,22
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.000.000	-	0,00	-	0,00
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.724.667.662	122.729.021	7,12	122.729.021	7,12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	1.200.000	24,00	1.200.000	24,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	533.545.162	13.711.021	2,57	13.711.021	2,57
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.186.022.400	107.818.000	9,09	107.818.000	9,09
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.840.000	7.366.000	8,20	7.366.000	8,20
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	3.796.000	7,59	3.796.000	7,59
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.840.000	3.570.000	8,96	3.570.000	8,96
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.283.531.350	-	0,00	-	0,00
2.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	189.500.000	-	0,00	-	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	70.000.000	-	0,00	-	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	70.000.000	-	0,00	-	0,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	49.500.000	-	0,00	-	0,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.058.031.350	-	0,00	-	0,00
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	959.000.000	-	0,00	-	0,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	99.031.350	-	0,00	-	0,00
2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.000.000	-	0,00	-	0,00

	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.000.000	-	0,00	-	0,00
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	732.330.621	66.849.750	9,13	281.198.500	38,40
3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	382.277.000	45.007.250	11,77	259.356.000	67,85
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	47.921.000	8.980.000	18,74	25.000.000	52,17
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	334.356.000	36.027.250	10,78	234.356.000	70,09
3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	225.177.577	21.842.600	9,70	21.842.500	9,70
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	134.657.577	8.392.500	6,23	8.392.500	6,23
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	90.520.000	13.450.000	14,86	13.450.000	14,86
3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	124.876.044	-	0,00	-	0,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	99.876.044	-	0,00	-	0,00
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	25.000.000	-	0,00	-	0,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	167.547.750	53.994.250	34,27	74.398.750	47,22
4.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	74.398.750	53.994.250	72,57	74.398.750	100,00
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	74.398.750	53.994.250	72,57	74.398.750	100,00
4.3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	83.149.000	-	0,00	-	0,00
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	83.149.000	-	0,00	-	0,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	218.245.000	-	0,00	-	0,00
5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	218.245.000	-	0,00	-	0,00
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	67.320.000	-	0,00	-	0,00
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	150.925.000	-	0,00	-	0,00
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	360.341.370	49.380.000	13,70	49.380.000	13,70

6.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	189.686.650	49.380.000	26,03	49.380.000	26,03
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	117.078.650	49.380.000	42,18	49.380.000	42,18
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	72.608.000	-	0,00	-	0,00
6.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	170.654.720	-	0,00	-	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	105.593.000	-	0,00	-	0,00
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65.061.720	-		-	
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	527.592.211	12.986.700	2,46	12.986.700	2,46
7.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.450.000	-	0,00	-	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	75.450.000	-	0,00	-	0,00
7.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	452.142.211	12.986.700	2,87	12.986.700	2,87
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	100.902.000	12.986.700	12,87	12.986.700	12,87
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	351.240.211	-	0,00	-	0,00
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	198.477.300	-	0,00	-	0,00
8.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	198.477.300	-	0,00	-	0,00
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	150.000.000	-	0,00	-	0,00
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	48.477.300	-	0,00	-	0,00
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	136.994.500	-	0,00	42.485.000	31,01
9.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	52.024.500	-	0,00	-	0,00
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	52.024.500	-	0,00	-	0,00

9.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	84.970.000	-	0,00	42.485.000	50,00
	Pembinaan Promosi Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kamboan dalam Program KBPK dan Konseling Kesehatan Reproduksi	84.970.000	-	0,00	42.485.000	50,00
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	147.287.500	-	0,00	-	0,00
10.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	147.287.500	-	0,00	-	0,00
	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyajian Pengasuhan 1000 HPK	147.287.500	-	0,00	-	0,00
TOTAL		14.829.029.000	-	0,00	-	0,00

KEPALA DINAS P3APKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006